

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan pendapatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbesar berasal dari sektor pajak. Tidak kurang dari 70% sumber APBN Indonesia berasal dari pajak. Kesadaran masyarakat akan pajak harus ditingkatkan agar pembiayaan pembangunan disegala bidang bisa berjalan dengan lancar. Pandangan negatif masyarakat tentang pajak akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan lagi suatu usaha yang keras oleh pemerintah untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap fungsi uang pajak.

Penerimaan pajak terbesar salah satunya adalah dari pajak penghasilan. Untuk itu pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang Pajak Penghasilan untuk mengoptimalkan pendapatan Negara. Sejak Januari 1984, berlaku peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yaitu UU No. 7 tahun 1983.

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu di lakukan perubahan Undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan Nasional khususnya di bidang Ekonomi. UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali di ubah dan disempurnakan yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 17 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008. Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara, serta tetap mempertahankan system *Self Assasement* yakni sistem perpajakan dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Tidak halnya dengan PT Trans Marga Jateng yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Jasa Marga yang bergerak dalam bidang pengoperasian jalan tol Semarang – Solo, bertugas mengelola jaringan Jalan Tol dan memelihara seluruh ruas Jalan Tol agar selalu berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan jumlah pegawai yang banyak (termasuk pegawai tetap atau pegawai tidak tetap) pasti terdapat pelaksanaan pemungutan pph 21.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diuraikan dalam Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT TRANS MARGA JATENG.”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi bahasan dengan hanya membahas materi – materi yang berhubungan dengan kegiatan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yaitu bagaimanakah sistem administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT Trans Marga Jateng. Adapun perumusan masalahnya adalah:

1. Mengenai landasan teori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
2. Bagaimana mekanisme pemotongan, penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Trans Marga Jateng ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan Laporan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat serta mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama kuliah di Universitas Diponegoro.
2. Mengetahui gambaran umum PT Trans Marga Jateng.
3. Mengetahui secara lengkap dan jelas mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai PT Trans Marga Jateng

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Menambah pengetahuan mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT Trans Marga Jateng
2. Dapat dipergunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai PT Trans Marga Jateng

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dilakukan serangkaian pendekatan yang dipilih dalam rangka untuk memperoleh data yang di butuhkan dan kemudian data tersebut di olah sehingga menghasilkan informasi yang tersusun dalam satu laporan.

Ada dua jenis data yang diberikan dalam penulisan Tugas Akhir ini, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: (Dajan,2000;19-23)

1. Berdasarkan Jenisnya, yaitu :

- a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap obyek laporan yang diteliti, atau pihak yang berhubungan langsung dengan obyek laporan pada PT Trans Marga Jateng.

Data Primer dapat diperoleh dengan metode:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Narasumber.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dengan cara terjun langsung dan terlibat dalam praktik yang nyata.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data yang telah tersedia pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang atau dikumpulkan oleh pihak maupun instansi yang tidak berhubungan langsung dengan obyek laporan. Data sekunder diperoleh dengan metode:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan cara membaca buku yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir, seperti buku-buku mengenai perpajakan.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan data yang di ambil dari dokumen yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir, seperti Undang-undang Perpajakan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan.

2. Berdasarkan Sifatnya, yaitu :

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data berupa angka dan harganya berubah-ubah atau bersifat variable, seperti data mengenai gaji pokok dan gaji atas prestasi perbulan.

b. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data berupa tulisan yang di peroleh dari sumber tertulis, dalam hal ini buku atau literature. Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Metode Langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, yaitu Tanya jawab kepada terhadap pihak terkait langsung pada obyek penelitian, seperti Tanya jawab dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Karyawan Sumber Daya Manusia dan Umum (SDM) PT Trans Marga Jateng.

2. Metode Tidak Langsung

Metode Tidak Langsung adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku atau literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan membaca referensi berupa majalah, tabloid, yang terdapat di perpustakaan atau di tempat lain, seperti majalah mengenai pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini di uraikan latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT TRANS MARGA JATENG

Dalam Bab ini di uraikan tentang Gambaran Umum Perusahaan yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, wilayah kerja dan sebagainya.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Sistem pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Subjek dan Objek Pajak, Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final, Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan terkait tentang Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tetap PT Trans Marga Jateng.